

Membuka Potensi Kemitraan Komunitas dalam Mendorong Praktik Ekonomi Hijau: Pelajaran dari Kasus-kasus di Indonesia dalam Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Pengelolaan Limbah

Luh Kitty Katherina ^{*}, , Deshinta Vibriyanti , Inayah Hidayati , dan Vanda Ningrum 

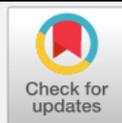
Pusat Penelitian Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional,
10340, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: luhk001@brin.go.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Katherina, L. K., Vibriyanti, D., Hidayati, I., & Ningrum, V. (2023). *Unlocking the Power of Community Partnerships in Driving Green Economy Practices: Lessons from Indonesia's Cases in Agriculture, Forestry, and Waste Management*. *Society*, 11(1), 137-157.

DOI: [10.33019/society.v11i1.532](https://doi.org/10.33019/society.v11i1.532)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Di tengah tantangan lingkungan hidup, bencana alam, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, pentingnya memelihara praktik berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat semakin terasa. Paradigma ekonomi hijau mewujudkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan tetap menjunjung kelestarian ekologis. Dalam konteks ekonomi hijau di negara-negara berkembang, peran praktik masyarakat menjadi bagian integral melalui lensa kemitraan masyarakat, yang mendukung upaya masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Namun demikian, kurangnya penyelidikan empiris yang substansial terhadap kemitraan yang terkait dengan praktik ekonomi hijau tetap mencolok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manifestasi kemitraan masyarakat dalam ranah praktik ekonomi hijau. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam praktik-praktik yang meliputi budidaya kopi organik di Aceh, peternakan lebah di Sumatera Barat, konservasi mangrove di Kalimantan Timur, dan pengelolaan sampah di Jakarta. Pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan diskusi kelompok terfokus di setiap lokasi, dan menganalisis data secara tematik. Studi ini mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, kemitraan masyarakat terkait praktik ekonomi hijau muncul sebagai upaya kolaboratif yang secara kolektif memberdayakan masyarakat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan lingkungan. Kedua, konfigurasi kemitraan masyarakat mengambil bentuk yang beragam, mulai dari upaya yang diprakarsai masyarakat hingga yang dimulai oleh bisnis atau entitas pemerintah. Ketiga, keterlibatan kemitraan dapat

Dikirim: 28 Maret, 2023;
Diterima: 3 Mei, 2023;
Dipublikasi: 30 Juni, 2023;

melibatkan satu komunitas atau meluas ke beberapa komunitas dalam suatu wilayah. Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi pembentukan institusi sosial yang kuat di dalam masyarakat sebagai langkah dasar untuk melaksanakan upaya kemitraan masyarakat yang mendukung praktik ekonomi hijau dalam masyarakat Indonesia. Implikasi sosial dari penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk penerapan praktik ekonomi hijau di tingkat akar rumput. Dari perspektif akademik, penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi pada evolusi model kemitraan dalam ranah pengembangan masyarakat dalam konteks kegiatan ekonomi hijau.

Kata Kunci: *Ekonomi Hijau; Kemitraan Masyarakat; Konservasi; Pengelolaan sampah*

1. Pendahuluan

Ekonomi hijau telah diidentifikasi sebagai peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, memberikan manfaat ekonomi dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Berbagai potensi praktik ekonomi hijau dapat dikembangkan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat dari segi ekologi dan ekonomi. Praktik-praktik ini juga penting untuk dibahas karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penghidupan ([International Labour Office, 2022](#)). Misalnya, proyek energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja di bidang manufaktur, instalasi, dan pemeliharaan peralatan; pertanian organik dapat meningkatkan pendapatan petani karena peningkatan nilai produknya; dan inovasi dalam pengolahan sampah dapat memberikan manfaat ekonomi.

Praktik kemitraan masyarakat dapat secara efektif mewujudkan dan mempertahankan praktik ekonomi hijau ([Tasrin et al., 2016](#)). Kemitraan masyarakat dianggap sebagai salah satu strategi yang digunakan dalam intervensi berbasis masyarakat. Konsep ini berasal dari hubungan berkelanjutan antara entitas eksternal dan anggota serta organisasi dalam suatu komunitas. Kemitraan ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilisasi sumber daya dan pengetahuan sekaligus mendorong proyek intervensi berbasis masyarakat ([Melo & Alves, 2019](#)).

Kemitraan masyarakat dalam ekonomi hijau dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat lokal, kemitraan antara pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat, serta usaha patungan antara anggota masyarakat dan organisasi nirlaba. Komitmen bersama terhadap pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dapat mendorong kemitraan ini. Kemitraan juga dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi hijau ([International Labour Office, 2019](#)). Meskipun terdapat banyak tantangan, hambatan, hambatan, dan kesulitan, keterlibatan masyarakat dalam kemitraan masyarakat yang otentik semakin diakui sebagai pendekatan paling efektif untuk proyek intervensi berbasis masyarakat ([Alves et al., 2018](#)).

Dalam perkembangannya, konsep kemitraan masyarakat telah diterapkan pada berbagai aspek yang membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak, seperti di bidang pelayanan publik (Rahmat & Cahyadi, 2019), kesehatan (El Ansari & Weiss, 2006; Melo & Alves, 2019), pertanian (Cahyanto *et al.*, 2021; Rahmi *et al.*, 2017), pendidikan (Gross *et al.*, 2015) dan aspek lainnya. Studi-studi yang ada belum mengeksplorasi implementasi kemitraan masyarakat dalam praktik ekonomi hijau.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kemitraan masyarakat dalam praktik ekonomi hijau di sektor pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah. Studi kasus tersebut meliputi budidaya kopi organik di Aceh, peternakan lebah madu di Sumatera Barat, konservasi hutan bakau di Kalimantan Timur, dan pengelolaan sampah di Jakarta. Uraian rinci mengenai beberapa praktik penting ekonomi hijau diperlukan karena dalam penerapannya banyak ditemui kendala dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi tersebut. Tantangan tersebut antara lain terbatasnya pasar terhadap produk yang dihasilkan karena jaringan yang terputus, sulitnya memenuhi standar kualitas pasar internasional, kurangnya figur pendorong, dan tantangan lainnya. Dengan kemitraan masyarakat, manfaat yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat meningkatkan potensi keberlangsungan kegiatan. Mendeskripsikan studi kasus adalah pelajaran berharga yang harus disebarluaskan. Kemitraan yang terbentuk bervariasi sesuai dengan karakteristik praktik-praktik yang sedang berlangsung dan lingkup kegiatannya. Penelitian ini akan menguraikan potensi manfaat ekonomi yang diperoleh melalui kemitraan dalam ekonomi hijau.

2. Kemitraan Masyarakat dalam Ekonomi Hijau: Tinjauan Pustaka

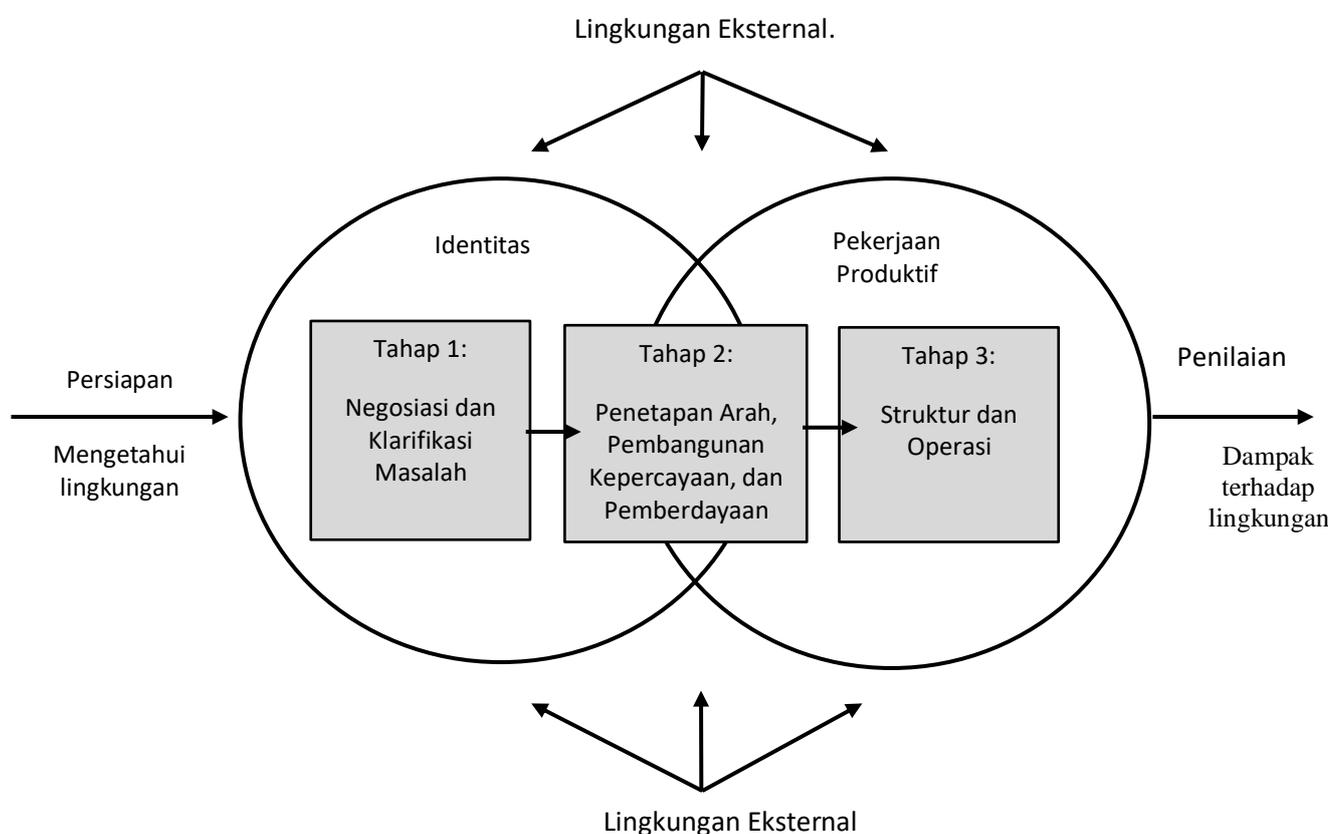
Dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan masyarakat telah mendapatkan pengakuan sebagai alat penting untuk mendorong intervensi dan penelitian dalam masyarakat. Kemitraan adalah pengaturan terstruktur antara dua atau lebih entitas dengan tujuan bersama yang melibatkan kesepakatan formal yang menguraikan peran, tanggung jawab, dan harapan (Bray, 1999). Hal ini biasanya memerlukan pengambilan keputusan bersama dan kepemilikan bersama atas sumber daya dan hasil serta merupakan komitmen jangka panjang. Sebaliknya, kolaborasi sering kali mengacu pada hubungan kerja informal dan sementara untuk mencapai tujuan bersama, dengan anggota datang dan pergi sesuai kebutuhan (Bergstrom *et al.*, 1996).

Kemitraan masyarakat memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi solusi berdasarkan kebutuhan dan aspirasi mereka (Jocom *et al.*, 2021). Konsep kemitraan masyarakat berpotensi untuk diterapkan dalam berbagai konteks penelitian dan praktik, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, atau kajian mengenai pembangunan berkelanjutan. Kemitraan yang melibatkan banyak pihak dapat menghasilkan inovasi dalam berbagai tantangan pembangunan, termasuk mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti bantuan teknis, sumber daya manusia, sumber daya pengetahuan, dan keuangan (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2019).

Kemitraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu masyarakat dan kemitraan. Masyarakat sendiri mempunyai definisi yang berjenjang dan cukup kompleks. Namun penelitian ini mendefinisikan masyarakat paling sederhana sebagai kelompok yang memiliki kesamaan. Menurut Ritonga *et al.* (2022), setidaknya suatu masyarakat mempunyai beberapa ciri: mempunyai jaringan kepentingan dan keprihatinan yang sama, bersifat simbolik dan fisik, menjadi bagian dari rumah tangga eksternal, dan memiliki sesuatu yang membedakan dirinya dari kelompok sejenis. Dan masyarakat dapat tumbuh atau menyusut sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Konsep kemitraan masyarakat hampir sama dengan beberapa konsep pemberdayaan masyarakat yang memiliki berbagai terminologi yaitu *Community and Local Development (CLD)*, *Community Participation (CP)*, *Community-Based Enterprise (CBEs)*, *Local Economic Development (LED)*, dan lain-lain. Semua terminologi tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu melibatkan kelompok entitas masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Ebewo, 2014). Namun, yang membedakan adalah kemitraan lebih aktif dan berkomitmen dibandingkan keterlibatan atau partisipasi. Mitra berbagi tanggung jawab untuk kegiatan bersama, sedangkan partisipasi dapat bekerja sama dalam kegiatan orang lain (Bray, 1999).

Kemitraan masyarakat meningkatkan komunikasi dan menghasilkan sumber daya untuk mengatasi permasalahan dan memfasilitasi penyelesaian masalah, sehingga menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan kolektif. Terlepas dari tantangan dan hambatan, kemitraan masyarakat yang sejati diterima secara luas sebagai praktik terbaik dalam proyek intervensi masyarakat, karena kemitraan tersebut mendorong perubahan berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dan secara efektif mengatasi masalah sosial (Alves et al., 2018; Melo & Alves, 2019).



Gambar 1. Kerangka Kerja Kemitraan untuk Pengembangan Masyarakat

Sumber: Melo & Alves (2019)

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diterbitkan oleh para peneliti lain mengenai kemitraan masyarakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat (Erfit & Yulmardi, 2018; Rustinsyah, 2015), penelitian ini menggunakan konsep kemitraan masyarakat yang dikembangkan oleh Habana-Hafner, Reed, and Associates pada tahun 1989, sebagaimana dikutip oleh Melo & Alves, 2019 (lihat Gambar 1). Kerangka kerja ini memberikan gambaran terstruktur mengenai fase-fase penting dalam membangun kemitraan pengembangan

masyarakat yang efektif. Tahap pendahuluan, "Persiapan", menjadi landasan bagi tahap selanjutnya. Selama fase ini, pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam kegiatan persiapan untuk menyiapkan landasan bagi keberhasilan kolaborasi. Hal ini mencakup memperjelas tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing mitra dan memastikan pemahaman bersama mengenai tujuan upaya tersebut. "Mengetahui lingkungan" melibatkan serangkaian langkah untuk memahami keadaan lingkungan yang terkait dengan suatu proyek atau kegiatan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap faktor lingkungan, tantangan, peluang, kebutuhan masyarakat, dan aspek terkait lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek atau kegiatan. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan, keputusan dapat dibuat, sehingga mengarah pada penerapan solusi yang lebih efektif.

Setelah tahap persiapan, kerangka kerja memasuki tiga tahap utama:

- 1) **Negosiasi dan Klarifikasi Masalah:** Tahap ini meliputi diskusi awal dan negosiasi antar mitra. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperjelas tantangan dan permasalahan yang ingin diatasi oleh kemitraan ini. Identifikasi masalah yang jelas menjadi dasar kolaborasi yang efektif.
- 2) **Penetapan Arah, Pembangunan Kepercayaan, dan Pemberdayaan:** Setelah tantangan dipahami, fokusnya beralih ke penetapan arah kolektif. Hal ini melibatkan penetapan tujuan dan strategi bersama. Membangun kepercayaan di antara mitra juga terjadi, membina lingkungan yang kondusif untuk komunikasi dan kolaborasi terbuka. Pemberdayaan masyarakat juga dimulai pada tahap ini, dengan maksud melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) **Struktur dan Operasi:** Pada tahap ini, elemen-elemen kunci seperti peran, tanggung jawab, dan mekanisme tata kelola ditentukan. Struktur organisasi kemitraan dibentuk, merinci hierarki, saluran komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan kerangka akuntabilitas. Kejelasan ini membantu meminimalkan kesalahpahaman, memperlancar komunikasi, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Selain itu, aspek operasional juga dibahas. Hal ini mencakup penjabaran bagaimana sumber daya akan dialokasikan, dikelola, dan dipantau untuk mendukung kegiatan kemitraan. Anggaran, jadwal, dan indikator kinerja ditetapkan untuk memastikan kemitraan berjalan sebagaimana dimaksud.

Setelah itu, kemitraan menilai hasilnya dengan mengevaluasi dampak lingkungan. Kemitraan dapat berlanjut atau berakhir berdasarkan strategi dan prioritas (Lester *et al.*, 2008).

Dalam ekonomi hijau, kemitraan masyarakat sangat penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini melibatkan kolaborasi antara bisnis lokal, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang mendukung pelestarian lingkungan. Model kemitraan masyarakat ini memiliki kekuatan, termasuk identifikasi masalah bersama dan penyelesaian masalah melalui pembangunan kepercayaan. Kemitraan yang sukses memerlukan aspek-aspek utama seperti saling menguntungkan, kesetaraan, legalitas, pemberdayaan, dan modal sosial. Kemitraan harus memberikan manfaat untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan kemandirian, dengan kedudukan yang setara bagi kedua belah pihak. Perjanjian tertulis (Surat Perjanjian) hendaknya mengatur kemitraan, bertujuan untuk pemberdayaan dan pembinaan, bukan sekedar bantuan permodalan. Modal sosial sangat penting untuk membangun kemitraan yang sukses (Erfit & Yulmardi, 2018).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam (Moser & Korstjens, 2018). Secara khusus, wawancara mendalam, observasi langsung, dan diskusi kelompok terfokus digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari para peserta. Selain itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan data statistik untuk memberikan landasan penelitian yang kuat dan menguatkan fakta di lapangan. Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk penelitian ini karena sifat metodologi penelitian kualitatif yang cocok dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang suatu topik penelitian (Jackson *et al.*, 2007). Lebih lanjut, fleksibilitas penelitian kualitatif juga memungkinkan penyesuaian pertanyaan penelitian berdasarkan informasi baru dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi fenomena yang diteliti (Holloway & Todres, 2003). Faktor-faktor ini berkontribusi pada validitas temuan dan relevansinya dengan situasi dunia nyata.

Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa tentang fenomena yang diselidiki (Duffy, 1987). Data yang dikumpulkan dari setiap teknik dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan. Untuk memastikan reliabilitas dan validitas temuan, dilakukan proses triangulasi, yaitu pemeriksaan silang terhadap data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan. Pendekatan ini penting dalam penelitian kualitatif karena membantu meningkatkan kredibilitas temuan dengan memastikan bahwa temuan tersebut konsisten di berbagai sumber dan informan dan bahwa bias atau perspektif peneliti tidak mempengaruhi temuan tersebut.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Praktek Kemitraan Masyarakat dalam Kegiatan Ekonomi Hijau

4.1.1. Kemitraan Masyarakat antara Petani Kopi dan Koperasi di Tanah Gayo Provinsi Aceh

Perkebunan kopi di Dataran Tinggi Gayo merupakan perkebunan rakyat yang ramah lingkungan. Bertani kopi merupakan pekerjaan utama sebagian besar penduduk di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pekerjaan utama dan sampingan. Sejak diperkenalkannya pertanian kopi oleh pemerintah kolonial Belanda, dilakukan tanpa menggunakan senyawa kimia apapun (Iswanto *et al.*, 2020). Meskipun pernah terkontaminasi, sebagian besar pertanian kopi telah kembali ke pertanian alami. Permintaan pasar internasional terhadap biji kopi berkualitas tinggi menjadi motivasi penting bagi petani kopi untuk melindungi lahannya dari senyawa kimia. Selain tingginya permintaan terhadap Kopi Green Bean Arabika Gayo, perkembangan industri kopi juga mendorong revitalisasi sektor hilir yang mencakup sektor industri dan jasa. Pengolahan tanaman kopi telah menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari warga.

Kemitraan antara petani dan koperasi telah berjalan efektif sejak tahun 2005, setelah terjadi konflik politik di Aceh (Khalisuddin *et al.* 2012). Citarasa Kopi Tanah Gayo yang sudah terkenal membuat para penikmat kopi terus mencarinya meski Belanda sudah meninggalkan Indonesia. Saat itu penjualan kopi dilakukan secara mandiri oleh petani, dimana pedagang kopi mendatangi masing-masing petani, membeli biji kopi hijau secara tunai atau memberikan uang muka. Minimnya informasi yang dapat diakses petani membuat para pedagang bebas menentukan harga bagi petani, sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat rendah. Petani tidak menerima keuntungan yang cukup dari ekspor kopi. Saat itu ekspor kopi hanya bisa dilakukan melalui Pelabuhan Belawan di Medan, sehingga keuntungan terbesar diperoleh para

pedagang yang membeli kopi dari petani dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar.

Koperasi kopi muncul sebagai jembatan antara petani dan pembeli kopi, dengan fokus pada distribusi dan perdagangan biji kopi hijau. Koperasi ini berperan sentral dalam pengembangan perkebunan kopi, khususnya dalam pemasaran ke dunia luar. Perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan petani mengakses informasi terkait harga kopi dan industri kopi global. Koperasi menjamin pasar dan harga bagus sesuai dengan harga pasar dunia untuk kopi Arabika Gayo. Hal ini membuat sebagian besar petani kopi di Tanah Gayo menjadi anggota koperasi. Selain memberikan jaminan harga, koperasi juga memberikan fasilitas pendampingan bagi petani kopi, termasuk sanksi bagi pelanggaran. Pedoman ini dimaksudkan untuk memantau seluruh aktivitas petani yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pasca panen, sehingga menghasilkan kopi berkualitas baik sesuai standar. Tugas ini dilaksanakan oleh *Internal Control System (ICS)*/instruktur pendidikan yang rutin mengunjungi petani dan perkebunannya. Manfaat kemitraan antara petani kopi dan koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Manfaat Kemitraan Masyarakat antara Petani Kopi dan Koperasi

Petani Kopi	Koperasi Kopi
Koperasi memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani kopi.	Kopi Arabika Gayo organik adalah komoditas dengan permintaan pasar yang tinggi, sehingga menguntungkan koperasi.
Koperasi mentransfer kemajuan pengetahuan ilmiah dalam mengelola kopi.	Produktivitas kopi yang dihasilkan oleh petani tetap stabil.
Koperasi adalah fungsi kontrol untuk memastikan tanah tetap organik.	Kualitas kopi sebagai komoditas ekspor terjamin dengan sertifikasi organiknya.
Melalui perantara koperasi, pasar kopi menjadi lebih luas dengan harga yang baik.	Semakin luas cakupan pasar, semakin tinggi keuntungan bagi koperasi.

Sumber: Data Lapangan Primer (2022)

Model kemitraan antara petani kopi dan koperasi merupakan suatu bentuk kemitraan masyarakat yang telah memiliki struktur kerjasama formal yang dituangkan dalam anggaran rumah tangga koperasi. Menurut [Melo & Alves \(2019\)](#), tahap satu dan dua sudah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Tahap pertama terjadi ketika petani kopi mendaftarkan lahannya sebagai anggota koperasi. Pada tahap ini, koperasi melakukan klarifikasi terhadap lahan milik petani yang terdaftar dan memeriksa kepemilikan, kondisi fisik, dan tanaman kopi. Petani kopi yang sebelumnya menggunakan pupuk kimia harus melakukan penyucian lahan yang memakan waktu satu hingga tiga tahun. Petani juga diberitahu mengenai hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Meski hubungan antara koperasi dan petani kopi tidak setara, namun dalam banyak hal, petani kopi memiliki banyak kebebasan, seperti kebebasan menjual kopinya kepada koperasi dan kepada siapa saja yang menawarkan harga terbaik.

Tahap kedua dilakukan perencanaan antara petani kopi dengan koperasi terkait kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini meliputi jadwal dan proses sertifikasi, perencanaan produksi berdasarkan produksi dan penjualan tahun sebelumnya, penyediaan benih, dan hal-hal teknis lainnya. Meski koperasi sudah memiliki anggaran rumah tangga yang jelas untuk tahap ketiga,

namun struktur koperasi dan detail teknisnya masih bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya saja dalam penyaluran iuran premi yang diberikan pembeli kepada petani melalui koperasi, selalu terjadi reegosiasi antara koperasi dan perwakilan petani. Perjanjian ini dibentuk berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.

Banyak koperasi yang bergerak di bidang perdagangan kopi dengan skala dan pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Koperasi Aceh Tengah, lebih dari 20 koperasi kopi telah memiliki jaringan pasar di Amerika, Eropa, Jepang, China, Australia, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Kopi Gayo memiliki tempat khusus di hati para penikmat kopi di seluruh dunia, sehingga selama beberapa waktu, harga kopi Gayo lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata bulanan di pasar New York untuk Other Mild Arabika (\$3,2), mencapai \$4,3 per kilogram (Taufiq, 2021). Kondisi ini tidak lepas dari terjalannya kemitraan yang baik antara koperasi dan petani kopi. Petani kopi menjaga kualitas kopi, dan koperasi menjaga serta memperluas pasar yang ada.

4.1.2. Kemitraan Masyarakat Dalam Budidaya Lebah Madu Galo-galo di Kota Sawahlunto Sumatera Barat

Peternakan kelulut atau lebah tanpa sengat semakin populer di Indonesia seiring dengan meningkatnya permintaan madu akibat pandemi COVID-19. Kelompok peternakan lebah Galo-galo di Sumatera Barat menonjol berkat pemimpin kreatifnya, yang membentuk kemitraan komunitas dengan Kebun Buah Kandi (area rekreasi pendidikan untuk memperkenalkan berbagai jenis buah sebagai kebutuhan asupan nutrisi. Lahan marjinal bekas tambang batu bara digunakan untuk tanaman hortikultura). Kemitraan ini mendukung aspek sosial, ekonomi, dan ekologi).

Kebun Buah Kandi, sebuah UPTD pemuliaan tanaman di kota Sawahlunto, telah dikonversi menjadi tempat wisata khas di lahan bekas pertambangan seluas 3,1 hektar dengan latar belakang Danau Kandi. Dimulai pada tahun 2012 dan memiliki sekitar 719 pohon buah-buahan, antara lain sirsak, markisa, nangka, jambu biji, dan buah naga. Sejak awal berdirinya, lembaga ini telah mendistribusikan lebih dari 6.061 bibit buah naga dan bibit buah lainnya kepada masyarakat. Kebun Buah Kandi tidak hanya sekedar objek wisata tetapi juga merupakan sarana edukasi dimana pengunjung dapat mempelajari berbagai jenis lebah, cara beternaknya, bahkan memanen madu langsung dari sarangnya. Tempat ini memiliki koleksi pohon buah-buahan yang dibudidayakan, dan kemitraan dengan kelompok petani lebah madu Galo-galo menjadi daya tarik pengunjung.

Pada tahun 2020, pimpinan Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” dan Kebun Buah Kandi membentuk kemitraan kolaborasi komunitas untuk mengumpulkan sumber daya dan mendorong keterlibatan komunitas dalam penyelesaian masalah. Kemitraan ini membangun hubungan yang saling menguntungkan antara operasional bisnis kedua organisasi. Memasukkan lebah madu Galo-galo ke Kebun Buah Kandi menghasilkan peningkatan penyerbukan bunga alami dan hasil buah yang lebih tinggi. Lebih lanjut, kemitraan ini memungkinkan para peternak lebah madu Galo-galo untuk memamerkan produknya kepada pengunjung kebun (lihat **Tabel 2**).

Tabel 2. Manfaat Kemitraan antara Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” dan Kebun Buah Kandi

Kebun Buah Kandi	Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang”
Meningkatkan produktivitas tanaman buah (pembentukan bunga) melalui penyerbukan oleh lebah.	Lahan tersedia untuk budidaya lebah madu Galo-galo.
Kunjungan wisatawan secara rutin meningkat.	Ketersediaan pakan lebah cukup dari bunga tanaman buah-buahan.
Permintaan kunjungan kelompok masyarakat (golongan) tertentu semakin meningkat.	Berbagai media promosi dan pemasaran tersedia untuk produk-produk yang terdapat di outlet Kebun Buah Kandi
Pendapatan meningkat dari penjualan tiket wisata.	Jaringan bisnis pun semakin luas.
Visi sebagai salah satu sarana pendidikan bagi masyarakat tercapai.	Praktik agrowisata memberikan pengetahuan tentang seluk-beluk peternakan lebah madu kepada pengunjung Kebun Buah Kandi.

Sumber: Data Lapangan Primer (2022)

Kolaborasi Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” dan Kebun Buah Kandi merupakan contoh konsep kemitraan masyarakat yang diusung [Melo & Alves \(2019\)](#). Kemitraan ini dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup penelitian lingkungan, seperti mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi faktor lingkungan, dan menentukan keanggotaan. Kepala UPTD Kebun Buah Kandi dan Ketua Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” mengawali kemitraan melalui koneksi personal. Selama tahap 1, para pemimpin berdiskusi dan bernegosiasi secara informal, mengidentifikasi peluang potensial yang menguntungkan kedua organisasi sambil menilai permasalahan mereka.

Pindah ke tahap 2, kemitraan berlanjut ke tahap perencanaan, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan sangat penting untuk keberhasilan kemitraan komunitas antara anggota dan agen eksternal ([Teufel-Shone et al., 2019](#)). Setelah kepercayaan terbentuk, aspek teknis dan struktural dari kemitraan dirancang, termasuk teknis operasional, pembagian keuntungan, personel, mitigasi risiko, dan perjanjian terkait lainnya. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman. Secara teknis, menempatkan sarang lebah madu di bawah pohon buah-buahan tidak menimbulkan masalah berarti kecuali menentukan jarak optimal antar sarang untuk penggunaan lahan yang paling efisien.

Kemitraan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang dinamis dan persisten, termasuk geografi, sejarah, politik, ekonomi, struktur kekuasaan, serta keragaman etnis dan budaya ([Melo & Alves, 2019](#)). Contoh faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kemitraan Kebun Buah Kandi dan KTH Kayu Gadang adalah pandemi COVID-19. Karena kebijakan *social distance* yang diberlakukan pemerintah, Kebun Buah Kandi ditutup untuk kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada pendapatan kedua belah pihak. Namun situasi ini tidak menghentikan kemitraan tersebut. Komunikasi yang kuat, hubungan interpersonal, komitmen, dan kepercayaan memungkinkan pendekatan yang gigih terhadap kondisi lingkungan eksternal.

Tahap 3 kemitraan melibatkan evaluasi dampak kemitraan terhadap lingkungan sosial dan fisik, dan mungkin berakhir tergantung pada strategi untuk mengatasi masalah awal atau isu

lainnya (Lester *et al.*, 2008). Untuk menjaga kemitraan yang berkelanjutan, refleksi bersama sangat penting untuk menilai tingkat kolaborasi antar anggota dan apakah upaya telah maksimal (Lester *et al.*, 2008). Perencanaan program dan sumber daya yang strategis juga penting untuk mempertahankan kolaborasi, dengan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan untuk mengidentifikasi tren dan permasalahan yang muncul serta mengembangkan strategi yang diperlukan (Bergstrom *et al.*, 1996). KTH Kayu Gadang berinovasi dengan menciptakan produk olahan madu seperti minuman kesehatan, sabun kecantikan, dan perban medis. Kebun Buah Kandi juga mempromosikan pariwisata kepada masyarakat luas, termasuk pelajar dan kelompok masyarakat, pasca pandemi Covid-19.

4.1.3. Kemitraan Komunitas Mangrove dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur memiliki ekosistem *mangrove* yang cukup besar, yang merupakan habitat penting bagi beragam flora dan fauna (Choong *et al.*, 1990; Kristiningrum *et al.*, 2020). Selain itu, hutan bakau menyediakan sumber daya yang signifikan bagi masyarakat lokal, termasuk peluang untuk memancing, berburu kepiting, memanen udang, dan pariwisata. Namun, kelangsungan hidup *mangrove* di Kalimantan Timur saat ini terancam akibat beberapa ancaman serius, terutama perambahan lahan dan polusi air (Ilman *et al.*, 2016; Powell & Osbeck, 2010). Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk menjaga ekosistem penting ini dengan menerapkan kebijakan dan praktik berkelanjutan yang mencakup kepatuhan ketat terhadap undang-undang dan peraturan serta inisiatif kemitraan berbasis masyarakat untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga ekosistem *mangrove* tetap sehat dan stabil, serta memastikan ekosistem tersebut tetap ada untuk generasi mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan CSR menjadi semakin penting bagi perusahaan di Indonesia karena mereka berupaya mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat lokal (Herawati, 2018; Masrunik *et al.*, 2021; Rondinelli & Berry, 2000). Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat lokal di Kalimantan Timur adalah contoh bagus bagaimana korporasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan, seperti melestarikan lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan prioritas masyarakat dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, meningkatkan reputasi mereka, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Kemitraan telah terjalin untuk mengelola Mangrove Center Graha Indah - Balikpapan dan kawasan *mangrove* Muara Badak - Kutai Kartanegara karena keterbatasan dana dari pemerintah daerah dan permasalahan lingkungan sekitar operasional usaha. Kemitraan ramah lingkungan, seperti yang dilakukan antara PT Badak LNG dan Pertamina, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengelola kawasan konservasi dengan meningkatkan tata kelola dan sumber daya pengelolaan dengan bantuan mitra swasta dan masyarakat (Kim *et al.*, 2016; Sunaryo *et al.*, 2014). Jenis kemitraan ini menjadi semakin populer karena memungkinkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konservasi lingkungan, dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan bekerja sama, kemitraan ini dapat membantu mengembangkan dan menerapkan strategi konservasi yang efektif, mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan menciptakan peluang ekonomi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Kemitraan ini melibatkan pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah dan pusat, LSM, lembaga pendidikan, serta perusahaan swasta dan BUMN sebagai penyandang dana.

Tabel 3. Manfaat Kemitraan Komunitas *Mangrove* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kalimantan Timur

Komunitas <i>Mangrove</i>	CSR Perusahaan
Edukasi bagi masyarakat yang berada di kawasan <i>mangrove</i> .	Meningkatkan citra perusahaan.
Meningkatkan produksi perikanan di perairan <i>mangrove</i> .	Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap citra merek suatu perusahaan.
Memulihkan dan melestarikan ekosistem <i>mangrove</i> .	Membedakan perusahaan dari pesaingnya melalui kemitraan ramah lingkungan.
Pembentukan destinasi wisata berbasis <i>mangrove</i> .	Menjalin kerjasama perusahaan dengan mitra di bidang lain (seperti pariwisata).
Peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan <i>mangrove</i> .	Meningkatkan keunggulan kompetitif.

Sumber: Data Lapangan Primer (2022)

Tahap pertama dalam bekerja dengan komunitas *mangrove* adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada (Melo & Alves, 2019). Misalnya, di Mangrove Center Graha Indah dan Kampung Nelayan Berdasi, permasalahan utamanya adalah kurangnya dukungan finansial untuk mengelola kawasan *mangrove*, termasuk pembelian benih, pemeliharaan hutan *mangrove* yang ada, pembersihan perairan dari sampah, perbaikan tanaman yang rusak, dan menyediakan prasarana untuk kegiatan pendidikan. Demikian pula kawasan *mangrove* Muara Badak - Kutai Kartanegara menghadapi tantangan besar terkait kerusakan lingkungan. Pada tahap awal ini, perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan *mangrove* dan perusahaan.

Pada tahap kedua kemitraan masyarakat, rasa saling percaya dibangun untuk menciptakan landasan keberhasilan. Perjanjian kemitraan di Mangrove Center Graha Indah dan Kampung Nelayan Berdasi melibatkan perencanaan rinci dan penyediaan sumber daya, identifikasi peran masyarakat, dan kesepakatan mengenai hal-hal kompleks seperti pemasangan logo untuk pemberdayaan masyarakat. Kemitraan ini menghasilkan kawasan *mangrove* yang lestari, partisipasi aktif masyarakat, dan manfaat bagi kedua belah pihak sekaligus memberikan dampak positif terhadap promosi lingkungan hidup perusahaan. Dalam kemitraan Muara Badak, kedua belah pihak sepakat dengan syarat saling menguntungkan, dengan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama. Masyarakat menghindari perilaku berbahaya, seperti pengeboman untuk menangkap ikan, dan perusahaan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk pekerjaan alternatif guna mempersiapkan kawasan tersebut untuk wisata edukasi. Kesepakatan dan manfaat bersama sangat penting, dan jika disepakati, perusahaan dapat memberdayakan masyarakat di kawasan *mangrove* (lihat Tabel 3).

Pada kemitraan masyarakat tahap ketiga, perusahaan mendorong praktik berkelanjutan dan program pemberdayaan masyarakat, seperti penanaman bibit *mangrove*, pemeliharaan, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam wisata pendidikan dan produksi produk sekunder juga didorong. Keberhasilan dalam tahap ini bergantung pada rencana implementasi yang jelas dan evaluasi dampak lingkungan. Mangrove Center Graha Indah dan Kampung Nelayan Berdasi telah mengalami penurunan kerusakan lingkungan dan

keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan paparan positif bagi perusahaan.

4.1.4. Kemitraan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

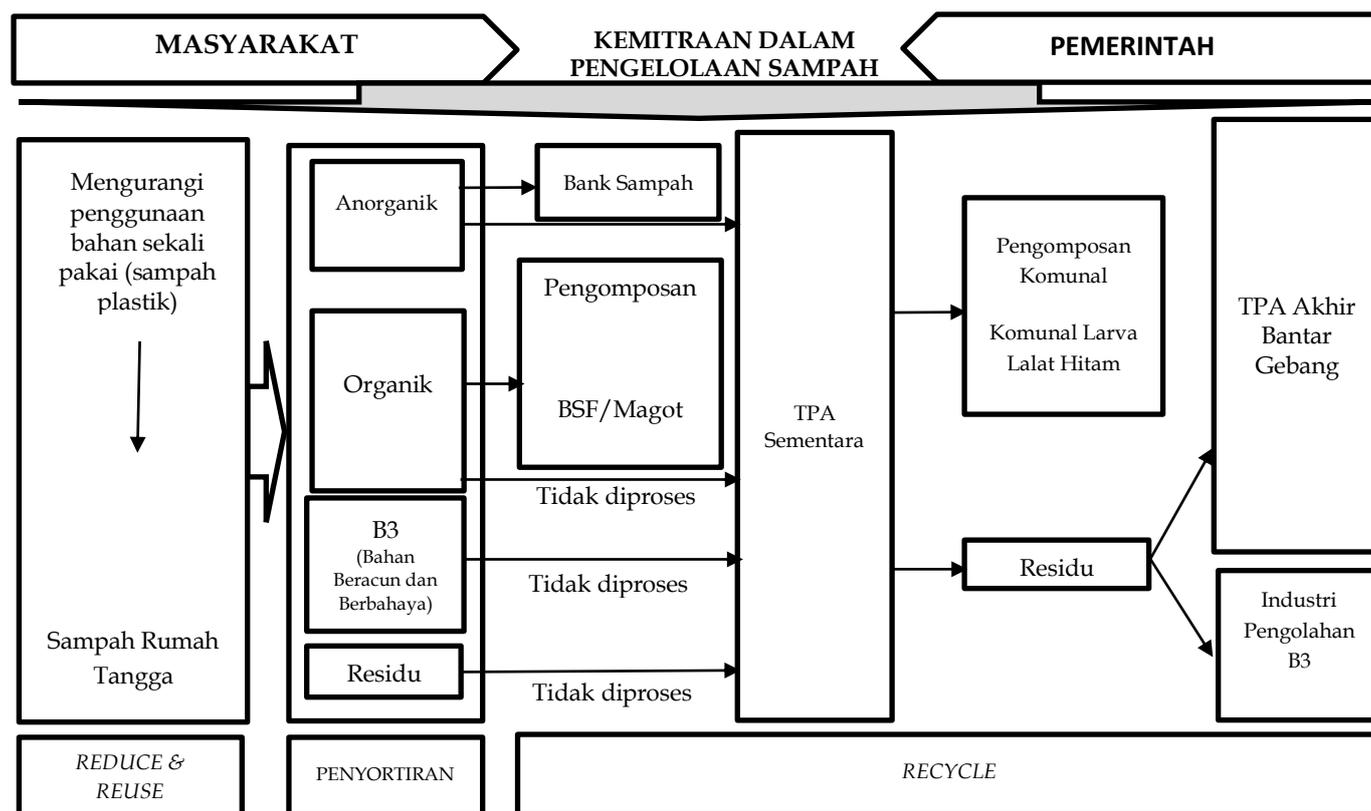
Selama satu dekade terakhir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 954 ribu jiwa, setara dengan peningkatan rata-rata tahunan sebesar 88 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Angka tersebut bisa jauh lebih tinggi karena terdapat 1,1 juta pekerja harian di Wilayah Ibukota Khusus Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2019). Dampak jumlah penduduk terhadap timbulan sampah sudah diketahui secara pasti. Misalnya, jumlah sampah harian yang dihasilkan bisa melebihi 7.695,9 ton, sehingga setiap tahunnya terdapat 2,8 juta ton sampah yang diangkut ke TPA akhir di Bantar Gebang (Megapolitan, 2022). Namun, pengukuran zona TPA saat ini menunjukkan bahwa hanya 5 dari 12 zona yang tersedia yang masih beroperasi, dengan 7 zona sisanya mencapai kapasitas maksimum dan tidak lagi mampu menampung sampah tambahan.

Selain itu, rata-rata jumlah sampah di zona lainnya telah melampaui 90% kapasitas TPA, sehingga meningkatkan potensi bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada upaya daur ulang, seperti kegiatan pengomposan dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, hanya 1% dari total timbulan sampah yang diproses melalui cara-cara ini. Akibatnya, kondisi kritis ini membahayakan daya dukung ekologi dan meningkatkan risiko tanah longsor, terutama pada musim hujan.

Praktik pengelolaan sampah yang inovatif diperlukan untuk mengatasi masalah produksi sampah yang semakin meningkat. Pendekatan kemitraan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah melibatkan beberapa program untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Paradigma baru *Reduce-Sorting-Recycle* menggantikan pendekatan konvensional *Collect-Transport-Dispose*. Upaya kebijakan untuk menerapkan paradigma baru ini antara lain dengan menerbitkan Peraturan Gubernur, seperti Nomor 142 tahun 2019 yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, dan Instruksi, seperti Nomor 107 tahun 2019, yang mendorong pengelolaan sampah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di bidang Industri, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 mewajibkan kawasan industri untuk mengelola limbahnya. Kebijakan pengelolaan sampah juga sudah dimulai di tingkat lingkungan melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan lainnya adalah kebijakan pengelolaan sampah juga mencakup praktik pengolahan sampah, dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Bank Sampah dan Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengurangan Sampah Organik dengan Metode Biokonversi *Black Soldier Fly* (BSF)/*Maggot* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penegakan peraturan ini memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dibandingkan hanya mengandalkan intervensi pemerintah (lihat Gambar 2). Kesadaran memilah sampah harus disebarluaskan ke semua tingkatan, termasuk rumah tangga, industri, dan pemerintah. Proses pemilahan meliputi pemilahan sampah menjadi sampah organik, anorganik, sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), dan sampah sisa. Sampah organik dapat dikelola melalui pengomposan, BSF/Magot, atau biopori di tingkat rumah tangga. Bank Sampah didirikan di tengah masyarakat untuk menangani jenis sampah organik lainnya. Limbah B3 yang berbahaya memerlukan pengolahan khusus, dan limbah elektronik memerlukan teknik disimulasi dan pengolahan di lokasi yang ditentukan yang dikelola oleh perusahaan pembuangan limbah elektronik. Kerja sama ini bertujuan untuk

mengurangi akumulasi sampah, memperbaiki kondisi lingkungan, dan meningkatkan manfaat ekonomi yang mendukung praktik ekonomi hijau.



Gambar 2. Model Kemitraan Pengelolaan Sampah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sumber: Data Lapangan Primer (2022)

Dalam pengelolaan sampah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengenali permasalahan produksi sampah yang signifikan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Studi ini menemukan bahwa perilaku warga dalam mengurangi dan memilah sampah sangat bergantung pada tingkat kesadaran lingkungan mereka dan bergantung pada bagaimana keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memberikan perlindungan lingkungan yang baik, termasuk mengelola sampah (Ningrum *et al.*, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa intervensi sekolah dalam bentuk penguatan dapat secara efektif mengurangi pemborosan, menggabungkan insentif dan konsekuensi untuk meningkatkan respons siswa terhadap lingkungan (Ningrum *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penerapan kebijakan penghargaan dan hukuman secara efektif mengubah praktik pengelolaan sampah.

Dalam konteks pengelolaan sampah, penelitian ini mengkaji implementasi perencanaan program dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk gugus tugas sampah di tingkat lingkungan, mendorong warga untuk memilah sampah di rumah dan memastikan sampah yang dipilah sesuai jadwal. Sejak gugus tugas ini dibentuk pada tahun 2021, pemerintah mengklaim bahwa mereka telah berhasil membantu 10% rumah tangga di Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memilah sampah. Terkait Bank Sampah, pemerintah mendukung infrastruktur, pelatihan, dan anggaran awal pengoperasian Bank Sampah. Selain itu, ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara yang memfasilitasi proses *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) sangat penting dalam pengelolaan sampah

di tingkat lingkungan. Data menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana terkonsentrasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat.

Di sisi lain, LSM mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah di Jakarta Utara, dimana hanya 2% sampah yang dikelola oleh masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah sebagai upaya penting dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan institusi sosial yang mapan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sampah menunjukkan praktik pengurangan sampah yang berhasil.

4.2. Model Kemitraan Masyarakat dalam Berbagai Jenis

Kemitraan masyarakat berbeda-beda tergantung lokasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Di sektor pertanian Aceh, petani kopi memprioritaskan kepentingan ekonomi dengan memenuhi permintaan pasar internasional melalui metode pertanian organik, yang menghasilkan harga lebih tinggi dan memberikan jaminan pasar. Metode pertanian organik juga mengurangi biaya produksi dengan memperpanjang umur tanaman kopi. Sebaliknya, pengelolaan sampah di DKI Jakarta, sektor pertanian di Sumatera Barat, dan sektor kehutanan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan lingkungan. DKI Jakarta memiliki volume timbulan sampah yang tinggi, kapasitas TPA yang terbatas, dan jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga mengarah pada upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat. Demikian pula dengan ekosistem *mangrove* di Kalimantan Timur yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, dan diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat setempat.

Sementara itu, tingginya kebutuhan produksi para peternak lebah madu Galo-galo di Sumatera Barat menimbulkan permasalahan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, mereka bermitra dengan Kebun Buah Kandi untuk mengolah lahan dengan sumber makanan yang cukup bagi lebah, meningkatkan produksi madu, dan menyerbuki pohon buah-buahan. Keberhasilan kemitraan ini dapat menginspirasi perancangan dan implementasi program kemitraan masyarakat di berbagai sektor dan wilayah.

Penelitian ini mengelompokkan kemitraan masyarakat menjadi tiga jenis berdasarkan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah: kemitraan yang timbul dari kebijakan atau program pemerintah, kemitraan yang bersumber dari inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan kemitraan dari kegiatan produksi yang diprakarsai oleh perusahaan. Dalam pengelolaan sampah DKI Jakarta, kemitraan ini melibatkan penerapan kebijakan dan program pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga, antara lain pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengomposan sampah organik, dan pengumpulan sampah anorganik melalui bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membentuk satuan tugas untuk mensosialisasikan program ini dan memastikan warga memilah sampah mereka. Selain itu, kemitraan ini menerapkan program bank sampah, pengomposan komunitas, dan pengelolaan pembuangan sampah sementara untuk meningkatkan keagenan kolektif dan “kekuatan bersama” dalam pengelolaan sampah di tingkat kota (Rowlands, 1997; Sirdey & Lallau, 2020). Tindakan kolektif dalam kemitraan ini juga berarti meningkatkan solidaritas untuk membangun kesadaran individu dalam melakukan perubahan menuju kelestarian lingkungan (Brugere et al., 2020; Rowlands, 1997).

Jenis kemitraan masyarakat yang kedua, yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, dicontohkan di sektor pertanian di Aceh dan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, kemitraan Kelompok Tani Hutan “Kayu Gadang” dan Kebun Buah Kandi mengedepankan saling menguntungkan, kesetaraan, legalitas, pemberdayaan, dan modal sosial yang dibangun

atas dasar kepercayaan yang dibangun seiring berjalannya waktu. Demikian pula kemitraan antara petani kopi dan koperasi di Aceh dilandasi oleh saling ketergantungan, karena petani mengandalkan koperasi untuk melakukan proses jual beli dengan kepastian harga dan proses pembayaran yang baik serta menghindari pengalaman negatif di masa lalu dimana pedagang atau pengepul menipu petani. Kemitraan ini menyoroti pentingnya inisiatif berbasis masyarakat dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Melibatkan masyarakat lokal dalam kemitraan ramah lingkungan memastikan upaya konservasi sejalan dengan kebutuhan lokal dan mendorong pembagian manfaat yang adil. Selain itu, keterlibatan masyarakat akan membangun kepercayaan, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan mengarah pada upaya konservasi yang lebih efektif serta hasil lingkungan dan masyarakat yang lebih baik (McGranahan & Mitlin, 2016).

Jenis kemitraan masyarakat yang ketiga dicontohkan oleh inisiatif CSR perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan di Kalimantan Timur. Program-program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan menumbuhkan partisipasi dalam melestarikan dan mengelola ekosistem *mangrove*. Secara khusus, mereka fokus pada pemulihan kawasan terdegradasi, pembangunan pembibitan, dan penciptaan ekowisata serta perikanan berkelanjutan untuk memberikan peluang mata pencaharian baru. Dengan mendorong pembangunan berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan ini bertujuan untuk melestarikan jasa ekosistem dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk masa depan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat lokal untuk membentuk perkembangan mereka dan mendorong kemandirian (Chapin *et al.*, 2016).

Penelitian ini membedakan dua jenis kemitraan: kemitraan yang melibatkan satu komunitas dan kemitraan yang melibatkan sekelompok komunitas di wilayah dan sektor tertentu. Kasus-kasus yang terjadi di sektor pertanian dan kehutanan di Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur merupakan contoh kemitraan yang melibatkan satu komunitas yang homogen. Di Aceh, kemitraan masyarakat antara petani dan koperasi melibatkan banyak koperasi dan ribuan petani. Di Sumatera Barat, kemitraan ini berfokus pada kegiatan para partisipan di peternakan lebah madu Galo-galo. Wawasan ini dapat menjadi masukan bagi rancangan dan implementasi program kemitraan masyarakat yang efektif di berbagai sektor dan lokasi.

Kasus pengelolaan sampah DKI Jakarta merupakan kemitraan masyarakat yang melibatkan sekelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Studi kasus pengelolaan sampah menunjukkan bahwa kemitraan masyarakat melibatkan kelompok-kelompok yang dibentuk secara kolektif berdasarkan wilayah geografis tertentu atau kepentingan tertentu. Keberagaman masyarakat di DKI Jakarta memberikan sumber daya dan tantangan terhadap praktik pengelolaan sampah. Karakteristik ekonomi, sosial, dan demografi mempengaruhi praktik kemitraan, dimana masyarakat kelas menengah memiliki institusi sosial yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan program pengelolaan sampah yang lebih baik.

Tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat sangat menentukan berbagai praktik ekonomi hijau di masyarakat. Bentuk kemitraan dan keterlibatan masing-masing aktor juga berbeda-beda tergantung pada empat kasus praktik ekonomi hijau. Namun keempat praktik tersebut dapat dilaksanakan bila terdapat kesadaran bersama antara masyarakat dengan pihak eksternal lainnya, baik dalam identifikasi masalah maupun pengumpulan sumber daya dari masyarakat dan entitas eksternal. Misalnya saja dalam kasus pengelolaan sampah di Jakarta, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memiliki visi yang sama untuk mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat. Sistem sosial dalam masyarakat membantu mengoordinasikan upaya

pemilahan sampah. Pada saat yang sama, perusahaan berkontribusi dengan menyediakan teknologi pengelolaan sampah, dan pemerintah menetapkan peraturan hukum dan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah di kota. Dalam konteks perkebunan, petani kopi dan koperasi berkolaborasi untuk menjaga kualitas kopi, sehingga menjamin keberlangsungan permintaan pasar global. Pelestarian kualitas ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, membina kemitraan yang kuat berdasarkan tujuan bersama untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan keuntungan finansial secara tidak langsung mendorong pelestarian lingkungan yang lebih baik dan alami.

Di sektor kehutanan, perusahaan dan masyarakat mempunyai visi bersama untuk meningkatkan dan melestarikan kelestarian lingkungan di lokasi tersebut. Program ini menguntungkan kedua belah pihak, dengan terciptanya lingkungan yang berkelanjutan di sekitar lokasi produksi dan masyarakat setempat dapat menerima manfaatnya. Sementara itu, kedua belah pihak memperoleh manfaat yang seimbang secara ekonomi dan ekologis dari praktik ekonomi hijau budidaya lebah madu Galo-galo. Kebun ini menyediakan lahan budidaya bagi lebah madu Galo-galo untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan produksi buah yang dibantu oleh penyerbukan lebah. Sedangkan ketersediaan makanan bagi lebah madu dipenuhi oleh bunga tanaman buah-buahan, sehingga produksi madu yang dihasilkan lebah pun meningkat.

Kondisi lingkungan, sistem sosial, peraturan pemerintah, budaya, dan demografi mempengaruhi proses kemitraan masyarakat. Keterbatasan penelitian ini adalah penulis tidak membandingkan praktik ekonomi hijau dengan praktik di negara berkembang lainnya. Meski demikian, gambaran praktik ekonomi hijau yang disajikan dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses kemitraan masyarakat di berbagai sektor di berbagai lokasi di Indonesia.

Tabel 4. Model Kemitraan

Aktor	Peran	Faktor Pendukung
Masyarakat lokal	Mengidentifikasi berbagai persoalan yang dialami masyarakat, sebagian besar persoalan yang diangkat berkaitan dengan lingkungan hidup, perekonomian, dan keadilan sosial. Mengumpulkan berbagai sumber daya yang dimiliki masyarakat.	Sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat masyarakat.
Bisnis	Berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi permasalahan mereka dan membuat program atau bantuan untuk mengatasinya.	Sebagai penunjang kegiatan usaha utama perusahaan, misalnya penyedia bahan baku. Kebijakan manajemen dalam kegiatan CSR meningkatkan nilai intrinsik perusahaan.
Pemerintah	Merumuskan kebijakan untuk memberikan pengakuan	Peraturan hukum untuk mendukung praktik ekonomi

Aktor	Peran	Faktor Pendukung
	hukum terhadap praktik ekonomi hijau di masyarakat. Berkolaborasi dengan berbagai aktor untuk memberikan dukungan dalam hal infrastruktur dan pendanaan.	hijau di tingkat lokal. Alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi lokal untuk praktik ekonomi hijau.
LSM	Memberikan pelatihan dan pendampingan penerapan praktik ekonomi hijau.	Penyelarasan visi antar LSM dalam pembangunan ekonomi hijau di tingkat lokal.

Sumber: Data Lapangan Primer (2022)

Kolaborasi kegiatan kemitraan yang melibatkan berbagai aktor dapat dilihat melalui berbagai tahapan, mulai dari identifikasi permasalahan yang ingin ditangani oleh masyarakat (negosiasi dan identifikasi masalah) hingga metode kerja dalam kegiatan kemitraan (membangun kepercayaan, struktur, dan pengoperasian praktik ekonomi hijau). Baik masyarakat lokal, pelaku usaha, pemerintah, maupun LSM terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kemitraan, seperti terlihat pada **Tabel 4**. Masyarakat lokal mengatasi permasalahan lingkungan, ekonomi, dan keadilan sosial dengan mengidentifikasi tantangan, melibatkan pihak yang berpengaruh, dan memanfaatkan sumber daya. Umumnya, masyarakat lokal memainkan peran penting dan bertindak sebagai pemilik objek bersama. Dunia usaha berkolaborasi, memberikan bantuan, dan bertindak sebagai penyedia bahan mentah. Pemerintah merumuskan kebijakan dan peraturan serta mengalokasikan anggaran untuk praktik ekonomi hijau. LSM menawarkan pelatihan, pendampingan, dan penyelarasan visi untuk pembangunan ekonomi hijau lokal. Pendekatan holistik ini mendorong perubahan positif dan keberlanjutan di masyarakat.

Pemberdayaan dalam konteks kemitraan dapat dipahami sebagai kekuatan dan kapasitas yang memungkinkan suatu masyarakat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga dimensi: dimensi personal, dimensi relasional, dan dimensi kolektif (Rowlands, 1997). Dimensi personal dari pemberdayaan melibatkan pengembangan kepercayaan diri dan kapasitas individu untuk mengatasi penindasan yang terinternalisasi. Misalnya, dalam bidang pertanian, hal ini berarti meningkatkan kemampuan petani untuk melakukan pertanian organik. Pengelolaan sampah melibatkan peningkatan pengetahuan rumah tangga dalam mengubah sampah menjadi sumber daya yang berharga. Dimensi relasional mencakup kemampuan untuk bernegosiasi dan mempengaruhi sifat hubungan. Hal ini mencakup hubungan antara petani dan konsumen atau antara petani dan pedagang. Di sisi lain, dimensi kolektif mengacu pada individu yang bekerja sama untuk mencapai dampak yang lebih luas melebihi apa yang dapat mereka capai secara individu.

5. Kesimpulan

Kemitraan masyarakat merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan praktik ekonomi hijau. Upaya kolaborasi antara dua pihak atau lebih diterapkan dalam berbagai praktik, termasuk pertanian, kehutanan, dan pengelolaan sampah. Inisiatif-

inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, pemerataan manfaat ekonomi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Studi ini mengidentifikasi tiga karakteristik utama kemitraan masyarakat dalam praktik ekonomi hijau. Pertama, kemitraan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan yang ada. Topik terkait praktik ekonomi hijau biasanya berkisar pada permasalahan ekonomi, seperti terbatasnya akses pasar, dan permasalahan lingkungan hidup, seperti menurunnya produktivitas lahan, kerusakan ekologi akibat aktivitas industri, dan timbulan sampah yang mencemari lingkungan.

Kedua, kemitraan masyarakat merupakan tindakan kolektif yang didasarkan pada kerja sama dan bukan kompetisi. Kolaborasi dapat terjadi antara anggota masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, atau masyarakat dengan perusahaan. Proses kemitraan menekankan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan dan kapasitasnya dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikannya serta membongkar konstruksi sosial yang negatif sehingga masyarakat memandang dirinya mempunyai kemampuan dan hak untuk bertindak dan mempengaruhi keputusan. Aksi kolektif dapat difokuskan secara lokal, misalnya pada komunitas atau kelompok petani yang bekerja di tingkat desa atau lingkungan atau yang lebih terlembaga dan dalam skala yang lebih besar, seperti gerakan pengelolaan sampah di tingkat kota.

Ketiga, peningkatan swasembada masyarakat dalam kegiatan kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, seperti kelompok petani kopi dan madu, dimana pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Sedangkan program kemitraan pada masyarakat yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan tidak bergantung langsung pada aktivitas penghidupan masyarakat masih mengandalkan bantuan dari mitra utama seperti pengelolaan *mangrove* di Kalimantan Timur dan pengelolaan sampah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan kasus yang diteliti, faktor yang sangat mendukung proses kemitraan adalah hadirnya lembaga sosial yang dibangun di tengah masyarakat. Semakin mapan lembaga sosial maka proses pemberdayaan melalui kemitraan semakin diarahkan pada pemberdayaan. Oleh karena itu, menciptakan institusi sosial yang kuat di masyarakat merupakan langkah awal dalam melaksanakan kegiatan kemitraan masyarakat untuk mendukung praktik ekonomi hijau di masyarakat Indonesia.

Rekomendasi yang ditawarkan dari penelitian ini adalah perlunya membangun sistem kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperkuat praktik ekonomi hijau yang telah dikembangkan di masyarakat. Penguatan sistem ini dapat dilakukan melalui insentif kebijakan bagi perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dalam praktik ekonomi hijau, komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan berbasis hijau, dan penguatan kelembagaan sosial di masyarakat sebagai penggerak masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi hijau. Secara keseluruhan, implikasi sosial dari penelitian ini memberikan wawasan berharga dalam menerapkan praktik ekonomi ramah lingkungan di tingkat lokal. Selain itu, dari sudut pandang akademis, hal ini dapat berkontribusi dalam memajukan model kemitraan dalam pengembangan masyarakat dalam konteks kegiatan ekonomi hijau.

6. Ucapan Terima Kasih

Pengumpulan data penelitian ini didanai oleh kerjasama penelitian antara Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan judul "Pembangunan Ekonomi Hijau

dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan Berkelanjutan,” dengan nomor kontrak NOMOR B-3441/III.7.3/HK.01.00/1/2022. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sari Seftiani yang telah mengkoordinasikan proses pengumpulan data.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alves, O., Santos, P. C., Fernandes, L., & Moreira, P. (2018). Barriers, obstacle, difficulties or challenges in development of health partnerships in community intervention projects: A systematic review. *Proceedings of the 4th IPEiria's International Health Congress*, 18(Suppl 2), 171.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Komuter di DKI Jakarta 2019*. <https://statistik.jakarta.go.id/statistik-komuter-dki-jakarta-2019/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi DKI Jakarta*. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html>
- Bergstrom, A., Clark, R., Hogue, T., Iyechad, T., Miller, J., Mullen, S., Perkins, D., Rowe, E., Russell, J., Simon-Brown, V., Sliniski, M., Snider, B. A., & Thurston, F. (1996). *Collaboration Framework...Addressing Community Capacity*. The National Network for Collaboration.
- Bray, M. (1999). *The private costs of public schooling: Household and community financing of primary education in Cambodia*. UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117632E.pdf>
- Brugere, C., Msuya, F. E., Jiddawi, N., Nyonje, B., & Maly, R. (2020). Can innovation empower? Reflections on introducing tubular nets to women seaweed farmers in Zanzibar. *Gender, Technology and Development*, 24(1), 89–109. <https://doi.org/10.1080/09718524.2019.1695307>
- Cahyanto, G. D., Wibowo, A., & Permatasari, P. (2021). Kemitraan antara Petani Kopi dengan Perusahaan (Studi Kasus Kintamani). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 173–190. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19426>
- Chapin, F. S., Knapp, C. N., Brinkman, T. J., Bronen, R., & Cochran, P. (2016). Community-empowered adaptation for self-reliance. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 19, 67–75. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.12.008>
- Choong, E. T., Wirakusumah, R. S., & Achmadi, S. S. (1990). Mangrove forest resources in Indonesia. *Forest Ecology and Management*, 33–34(C), 45–57. [https://doi.org/10.1016/0378-1127\(90\)90183-C](https://doi.org/10.1016/0378-1127(90)90183-C)
- Duffy, M. E. (1987). Methodological Triangulation: A Vehicle for Merging Quantitative and Qualitative Research Methods. *Image: The Journal of Nursing Scholarship*, 19(3), 130–133. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1987.tb00609.x>
- Ebewo, P. E. (2014). Establishing Community-Based Enterprises for Sustainable Development of Impoverished Communities: A Theoretical Perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2419044>
- El Ansari, W., & Weiss, E. S. (2006). Quality of research on community partnerships: Developing the evidence base. *Health Education Research*, 21(2), 175–180. <https://doi.org/10.1093/her/cyh051>

- Erfit, E., & Yulmardi, Y. (2018). Partnership model for small industry in cluster perspective in encouraging regional development (case study on some small industries in Jambi City). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 235–242. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i2.5856>
- Gross, J. M. S., Haines, S. J., Hill, C., Grace, L., Blue-banning, M., & Turnbull, A. P. (2015). Strong School - Community Partnerships in Inclusive Schools Are “ Part of the Fabric of the School We Count on Them .” *School Community Journal*, 25(2), 9–34. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085646.pdf>
- Herawati, N. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Perkebunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 23(2), 74–89. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i2.2451>
- Holloway, I., & Todres, L. (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence. *Qualitative Research*, 3(3), 345–357. <https://doi.org/10.1177/1468794103033004>
- Ilman, M., Dargusch, P., Dart, P., & Onrizal. (2016). A historical analysis of the drivers of loss and degradation of Indonesia’s mangroves. *Land Use Policy*, 54, 448–459. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.010>
- International Labour Office. (2019). *Skills for a greener future: a global view*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_732214.pdf
- International Labour Office. (2022). *Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people*. International Labour Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_853321.pdf
- Iswanto, S., Zulfan, Z., & Suryana, N. (2020). Gayo Highland Takengon from 1904 To 1942: A Historical Analysis of Coffee Plantations at the Era of Dutch Colonialism. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(1), 69–82. <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i1.21637>
- Jackson, R. L., Drummond, D. K., & Camara, S. (2007). What is qualitative research? *Qualitative Research Reports in Communication*, 8(1), 21–28. <https://doi.org/10.1080/17459430701617879>
- Jocom, S. G., Memah, M. Y., & Pngemanan, L. R. (2021). Community participation in local economic development in the village of Makalu, Posumaen sub-district. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 681(1), 12084. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/681/1/012084>
- Khalisuddin, K., Setyantoro, A. S., Gayosia, A. P., & As, N. B. (2012). *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kim, M. G., Woo, C., Rho, J. J., & Chung, Y. (2016). Environmental capabilities of suppliers for green supply chain management in construction projects: A Case Study in Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.3390/su8010082>
- Kristiningrum, R., Lahjie, A. M., Masjaya, Yusuf, S., Ruslim, Y., & Ma’ruf, A. (2020). Fauna diversity, production potential and total economic value of mangrove ecosystems in mentawir village, east kalimantan, indonesia. *Biodiversitas*, 21(5), 1940–1953. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210522>
- Lester, H., Birchwood, M., Tait, L., Shah, S., England, E., & Smith, J. (2008). Barriers and facilitators to partnership working between Early Intervention Services and the voluntary and community sector. *Health and Social Care in the Community*, 16(5), 493–500.

<https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2008.00760.x>

- Masrunik, E., Wahyudi, A., Khoirianto, R., & Wulandari, R. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) Darussalam Wates. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 26–30. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v1i1.10796>
- McGranahan, G., & Mitlin, D. (2016). Learning from Sustained Success: How Community-Driven Initiatives to Improve Urban Sanitation Can Meet the Challenges. *World Development*, 87, 307–317. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.019>
- Megapolitan. (2022). Kadis LH: Rata-rata 7.500 Ton Sampah Jakarta Dibuang ke TPST Bantargebang Tiap Hari. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/10/13403081/kadis-lh-rata-rata-7500-ton-sampah-jakarta-dibuang-ke-tpst-bantargebang>
- Melo, P., & Alves, O. (2019). Community empowerment and community partnerships in nursing decision-making. *Healthcare*, 7(2), 76. <https://doi.org/10.3390/healthcare7020076>
- Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9–18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>
- Ningrum, W. A., Khatimah, H., & Putra, P. (2022). Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos. *An-Nizām: Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v1i2.4167>
- Powell, N., & Osbeck, M. (2010). Approaches for understanding and embedding stakeholder realities in mangrove rehabilitation processes in Southeast Asia: Lessons learnt from Mahakam Delta, East Kalimantan. *Sustainable Development*, 18(5), 260–270. <https://doi.org/10.1002/sd.477>
- Rahmat, I., & Cahyadi, A. (2019). Community Partnership: Improvisasi Model Pelayanan Publik melalui Keterlibatan Komunitas di Indonesia. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 3(1), 1–20. <http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v3i1.4764>
- Rahmi, R., Zakiah, Z., & Marsudi, E. (2017). Peranan Kemitraan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Kopi (Kasus Kemitraan: Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayan Dengan Petani Kopi di Kecamatan Pegasing). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 2(3), 118–130. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v2i3.3750>
- Ritonga, F. U., Atika, T., Arifin, A., & Fauzan, I. (2022). *Interoensi Komunitas dan Gerakan Sosial Birmingham Small Arm Owner's Motorcycle Siantar (BOM'S)*. Jejak Pustaka.
- Rondinelli, D. A., & Berry, M. A. (2000). Environmental citizenship in multinational corporations: Social responsibility and sustainable development. *European Management Journal*, 18(1), 70–84. [https://doi.org/10.1016/S0263-2373\(99\)00070-5](https://doi.org/10.1016/S0263-2373(99)00070-5)
- Rowlands, J. (1997). *Questioning Empowerment: Working with women in Honduras*. Oxfam GB.
- Rustinsyah. (2015). A pattern for partnership between LMDH and perhutani to enhance local community prosperity and preserve the forest: A case study at RPH Besowo, Kediri Regency, Indonesia. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 13(3), 265–271. <https://doi.org/10.1080/10042857.2015.1059595>
- Sirdey, N., & Lallau, B. (2020). How do producer organisations enhance farmers' empowerment in the context of fair trade certification? *Oxford Development Studies*, 48(2), 166–180. <https://doi.org/10.1080/13600818.2020.1725962>
- Sunaryo, B., Sulisty, I. W., Irkham, A. M., & Gamal, M. R. (2014). Implikasi Pendekatan Green Partnership dalam Program Konservasi Kawasan Mangrove di Perairan Utara Terhadap Terciptanya Kegiatan Ekonomi Hijau Pada Masyarakat Kota Bontang. *Geoedukasi*, 3(1), 1–14.

- Tasrin, K., Pratiwi, & Ella, S. (2016). *Model Kemitraan Strategis Dalam Pengembangan Inovasi Administrasi Negara*. https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2019/09/PKP2A-I-KA_Model-Kemitraan-2016.pdf
- Taufiq, F. M. (2021). Peran Ekonomi Budidaya Kopi Arabika Gayo Dalam Percepatan Pembangunan Daerah. *InfoPublik*. <https://www.infopublik.id/kategori/cerita-khas/527323/peran-ekonomi-budidaya-kopi-arabika-gayo-dalam-percepatan-pembangunan-daerah>
- Teufel-Shone, N. I., Schwartz, A. L., Hardy, L. J., de Heer, H. D., Williamson, H. J., Dunn, D. J., Polingyumptewa, K., & Chief, C. (2019). Supporting new community-based participatory research partnerships. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(1), 44. <https://doi.org/10.3390/ijerph16010044>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2019). *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. https://www.tnp2k.go.id/download/5991001Buku_KemitraanFINAL.pdf

Tentang Penulis

- Luh Kitty Katherina**, peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan spesialisasi sosial demografi dan kajian perkotaan. Luh Kitty Katherina memperoleh gelar sarjana dan magister perencanaan kota dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia.
E-Mail: luhk001@brin.go.id
- Deshinta Vibriyanti**, peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan spesialisasi kajian lansia dan aspek sosial demografi lainnya. Deshinta Vibriyanti meraih gelar sarjana psikologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, dan gelar magister di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia.
E-Mail: desh001@brin.go.id
- Inayah Hidayati**, peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang fokus pada mobilitas penduduk dan sosial demografi. Inayah Hidayati meraih gelar di bidang geografi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, dan Universitas Indonesia.
E-Mail: inay001@brin.go.id
- Vanda Ningrum**, peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan spesialisasi pengembangan masyarakat dan kajian kebencanaan. Vanda Ningrum meraih gelar magister di bidang manajemen dan kesejahteraan sosial dari ISIDA School of Business, Italia, dan Universitas Indonesia.
E-Mail: vand001@brin.go.id